

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik maka diperlukan administrasi perkantoran yang baik. Terkait dengan administrasi perkantoran di setiap instansi/lembaga baik instansi milik pemerintah maupun instansi perorangan/swasta maka instansi tersebut harus memiliki bidang pekerjaan yang disebut kepegawaian yang berfungsi untuk mengelola seluruh persoalan berkaitan dengan pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi/lembaga tersebut. Bidang kepegawaian tersebut pada hakikatnya bertugas mengolah segala data kepegawaian yang merupakan data yang sangat penting/vital bagi sebuah instansi baik instansi pemerintahan maupun swasta.

Administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan (mauliasyifa, 2011). Untuk dapat melaksanakan administrasi kepegawaian ini dibutuhkan seorang pegawai yang disebut sebagai administrator yang bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan seluruh aktivitas untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah di tentukan sebelumnya. Administrasi kepegawaian merupakan suatu cara yang mempelajari tentang kebijaksanaan, sasaran dan proses pembinaan sumber daya manusia yang masih berstatus sebagai Pegawai. Adapun

kegiatan yang dilakukan dalam administrasi kepegawaian yaitu pengadaan kepegawaian, pembinaan pegawai dan lain-lain. Perkembangan Administrasi Kepegawaian dimulai sejak bangsa Indonesia membentuk pemerintahan yang merdeka dan berdaulat.

Peranan administrasi kepegawaian semakin penting sejak pemerintah mulai mencanangkan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dimana unsur sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan baik dalam tugas pemerintah maupun dalam pembangunan. Administrasi Kepegawaian sangat penting peranannya bagi dunia usaha yang baik instansi pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun swasta. Tanpa adanya penerapan administrasi kepegawaian yang baik maka badan usaha atau kantor milik pemerintah tersebut tidak mungkin dapat berjalan dan berkembang dengan baik dan lancar.

Administrasi kepegawaian mempunyai peran penting bagi sebuah kantor maka administrasi perlu dikelola menggunakan sistem pengelolaan administrasi yang baik dan benar, sehingga apabila ada pihak yang membutuhkan akan dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Banyak faktor yang mempengaruhi agar administrasi kepegawaian mempunyai citra yang positif antara lain adalah pegawai yang terdidik dan terampil, terjaminnya keamanan pengelolaan data kepegawaian, dan penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pertukaran informasi yang baik. Demi kelancaran semua pekerjaan pegawai, sebuah kantor harus mempunyai suatu sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan benar baik di bidang kinerja maupun citra. Pengelolaan data kepegawaian ini berkaitan dengan seluruh proses dalam pengelolaan pegawai seperti kenaikan pangkat, jabatan, mutasi, pendidikan dinas, penindakan, berhenti, dan pensiun. Prestasi dan kesalahan pegawai tidak terlepas dari bagaimana cara sebuah instansi menangani pegawai yang

dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah senantiasa melakukan pelatihan bagi pegawai sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan memberikan pelatihan yang efektif maka akan meningkatkan prestasi kerja pegawai, yang selanjutnya berindikasi pada peningkatan produktivitas kerja mereka. Dengan terus meningkatnya prestasi kerja seorang pegawai selanjutnya instansi menyeleksi prestasi kerja pegawai yang lebih menonjol dan memberikan promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki keberagaman adat dan budaya. Provinsi Sumatera Barat adalah satu provinsi yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan itu antara lain dapat dilihat dari bahasa, suku dan budaya adat Minangkabau. Perbedaan itu perlu dikembangkan agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh dengan Provinsi lainnya. Dalam rangka membina dan mengembangkan bahasa dan sastra di Indonesia maka dibentuklah sebuah



lembaga/instansi pemerintah yang disebut dengan Balai Bahasa. Balai Bahasa merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya bernama Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang berwenang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka penulis memilih judul “Proses Pengolahan Data Kepegawaian pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengolahan data kepegawaian pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengolahan data kepegawaian yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengolahan data kepegawaian pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bagian Kepegawaian dalam melakukan proses pengolahan data kepegawaian pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penulisan

- a. Bagi akademisi

Untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan data kepegawaian pada Balai Bahasa Padang, menambah ilmu dan wawasan, berfikir serta memantapkan ilmu yang telah diperoleh.

- b. Bagi praktisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam proses pengolahan data kepegawaian pada instansi pemerintah di masa yang akan datang.

- c. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk menelaah lebih lanjut mengenai proses pengolahan data kepegawaian pada instansi pemerintah di masa yang akan datang.

1.5. Metode Penulisan

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan tugas akhir ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, penulis menggunakan berbagai macam metode guna mendapatkan data-data yang penulis perlukan yang terdiri dari :

1. Penelitian lapangan (observasi dan wawancara)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan/Magang, guna memperoleh data yang akurat dengan meneliti keadaan yang sebenarnya serta melakukan wawancara dengan pihak - pihak yang terkait dengan proses pengolahan data pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.

2. Penelitian Kepustakaan

Menggunakan buku-buku sebagai referensi dalam menganalisa hal - hal yang dibahas dalam tulisan ini, sehingga diperoleh perbandingan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada dan juga memperkuat dasar-dasar pembahasan.

1.6. Tempat dan Waktu Magang

Untuk memenuhi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis melaksanakan magang yang sesuai dengan judul Tugas Akhir yang diajukan oleh penulis, yaitu Proses Pengolahan Data Kepegawaian pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan magang ini dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat

sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d 13 Oktober 2015 yang dapat dilihat pada lampiran.

Namun demikian, kegiatan magang dan penempatan penulis tergantung pada kesediaan

dan keputusan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Penulis mendapat bimbingan dari Kasubag Tata Usaha dan pegawai - pegawai di bidang Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat penulis laksanakan dengan sebaik-baiknya.

1.7. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tempat dan waktu magang, sistematika laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam penjelasan dan pembahasan tugas akhir ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM BALAI BAHASA PROV. SUMBAR

Menguraikan tentang gambaran umum Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Wilayah Kerja dan Struktur Organisasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menguraikan tentang Proses Pengolahan Data Kepegawaian pada Balai

Bahasa Padang

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

